



ISU MULTIKULTURALISME DALAM TRANSISI PERUBAHAN DUNIA

Sigit Prawoto
Universitas Brawijaya
prawoto@ub.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2021
Disetujui Oktober 2021
Dipublikasikan
Desember 2021

Abstrak

Multikulturalisme semakin menjadi wacana penting dalam pergaulan dunia seiring dengan meningkatnya penampilan identitas lokal dan klaim teritorial di berbagai negara. Kemunculan beberapa calon pemimpin di banyak negara dan para pemenang kontestasi politik di negara-negara itu dapat dimaknai sebagai reaksi atas persoalan multikulturalisme yang sedang berlangsung. Pengamatan yang dilakukan terhadap wacana politik di beberapa negara Eropa dan Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan identitas sedang berhadapan dengan multikulturalisme hari ini. Persoalan pergesekan klaim identitas yang telah berlangsung bertahun-tahun terakumulasi dan mendapatkan tambahan ketika gelombang migrasi besar muncul dari negara lain. Permasalahan multikulturalisme di Indonesia sebagai sisa-sisa pemilihan presiden tahun 2014 masih terlihat jelas hingga saat ini. Persoalan identitas sering muncul dalam wacana publik hingga jargon-jargon nasionalisme dan tindakan tegas dari negara muncul untuk mengimbangi.

Kata Kunci: wacana, multikulturalisme, identitas, politik, konflik

Abstract

Multiculturalism is increasingly becoming an important discourse in the global community, that along with the increasing appearance of local identities and territorial claims. The rise of several candidates for national leaders in many countries and the winners of political contestations in those countries can be interpreted as a reaction to the ongoing multiculturalism problem. Observations made on political discourse in several European countries and Indonesia show that the issue of identity is facing multiculturalism today. The problems of conflicting identity claims that have been going on for years are accumulating and earn reinforcement when large waves of migration occur from other countries. The problems of multiculturalism in Indonesia as a residue of general election of 2014 are still clear to this day. The issue of identity continues to enliven public discourse until the jargons of nationalism and decisive action from the state emerge to compensate.

Keywords: discourse, multiculturalism, identity, politics

PENDAHULUAN

Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan isu multikulturalisme yang terjadi di beberapa bagian dunia yaitu Eropa, Amerika dan Indonesia. Tahun-tahun 2014 hingga 2021 ditandai dengan maraknya wacana kultural dalam banyak pergantian kepemimpinan negara di berbagai belahan dunia. Perancis, Amerika Serikat dan Indonesia telah menunjukkan bagaimana identitas etnik dalam balutan nama kultur berperan menjadi wacana dominan dalam keterpilihan seorang kepala negara. Klaim atas pemilik kultur asli begitu gencar dihembuskan oleh sebagian masyarakat di negara-negara itu untuk mendaku legitimasi penguasaan wilayah. Mereka mengklaim sebagai pemilik sah sebuah wilayah (Lambert, 2015). Mereka juga tidak ingin berbagi tempat dengan orang lain yang datang belakangan ke wilayah itu (Welle (www.dw.com), n.d.). Penolakan ini tentunya memiliki kaitan dengan adanya rasa khawatir bahwa kultur mereka akan terganggu akibat masuknya orang-orang baru tersebut.

Rasa khawatir akan kehilangan identitas yang menjadi wacana global perlu diperhatikan secara serius. Budaya memiliki posisi menentukan dalam sebuah negara sehingga negara yang terbentuk dari kultur tunggal akan mengalami dinamika yang berbeda dibandingkan dengan negara yang terbentuk dari beberapa budaya. Di Amerika Serikat yang penduduknya menyadari bahwa masyarakat mereka adalah multietnik, persoalan perbedaan budaya telah berlangsung sejak lama dan dianggap penting, meskipun perjuangan persamaan hak di antara warga negara dan penghapusan politik rasial memerlukan waktu penyelesaian yang panjang.

Persoalan multikulturalisme saat ini banyak dibicarakan dalam berbagai forum di dunia. Masyarakat multikultural terbentuk dari penyatuan wilayah secara paksa ataupun secara suka rela dari wilayah yang berbeda-beda. Masyarakat multietnik terjadi dengan sendirinya karena adanya migrasi individual atau berkelompok sehingga terbentuk kelompok politik. Negara berada di luar kelompok politik ini, sedangkan masyarakat multikultural memiliki ciri adanya masyarakat multietnik. Sumber-sumber sosiologis lebih sering mendefinisikan multikulturalisme sebagai suatu sistem kepercayaan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang beragam dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai perbedaan sosial budaya mereka, dan mendorong dan memungkinkan kontribusinya dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan semua dalam organisasi atau masyarakat (Rosado, 2012).

Secara umum, multikulturalisme mengacu pada situasi dimana orang-orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, bahasa, atau agama berbeda hidup berdampingan satu sama lain dalam ruang sosial yang sama, berkeinginan untuk mempertahankan aspek yang relevan dari perbedaan mereka sendiri dan untuk diakui secara umum (Colombo, 2014). Istilah multikulturalisme berawal dari dua pandangan. Pandangan normatif menyebutkan bahwa

multikulturalisme sebagai cakrawala ideal sebuah masyarakat kosmopolit yang semestinya sudah meninggalkan prasangka dan pikiran-pikiran xenofobia atau nasionalis, untuk menerima pluralitas. Dalam pandangan deskriptif, multikultural adalah masyarakat yang tersusun dari kehidupan bersama kelompok-kelompok yang “secara budaya” heterogen. Persimpangan keduanya kemudian memunculkan pandangan preskriptif yaitu politik multikulturalis yang berupaya menyelenggarakan kehidupan bersama yang damai dan pengakuan atas adanya pluralitas (Dhume, 2012).

METODE

Penelitian dilakukan secara langsung dengan masuk ke dalam lingkungan masyarakat amatan terutama di Prancis dan di beberapa wilayah Eropa. Pengamatan langsung ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang nyata atas persoalan multikulturalisme di negara-negara yang memiliki kekayaan dalam keragaman etnis dan ras. Wawancara dengan penduduk setempat juga dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber pertama. Selain itu dilakukan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai macam berita dari televisi, koran serta media online yang memberitakan tentang persoalan sosial kultural yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi Identitas

Pemberitaan identitas kultural pada beberapa negara di Eropa tampak ramai seiring munculnya persoalan ekonomi yang menimpa mereka. Inggris sebagai negara kolonialis terbesar di dunia memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Sebuah pelarian diri yang dikenal dengan Brexit ini mendapatkan sambutan hangat dari calon presiden Prancis Marion Anne Perrine Le Pen dan partai Front National yang dipimpinya. Politisi perempuan yang lebih dikenal dengan nama Marine Le Pen ini merencanakan langkah serupa untuk Prancis jika terpilih menjadi presiden “*Une fois de plus, la présidente du FN affirme que, si elle était élue à l'Élysée en 2017, elle organiserait elle aussi un référendum sur la sortie de la France de l'UE*” (R.L, 2016).

Inggris yang pernah ditolak untuk bergabung Uni Eropa oleh Prancis yang saat itu dipimpin Charles de Gaulle—saat itu masih berupa Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)—akhirnya meminta diri untuk lepas dari Uni Eropa saat krisis regional mulai menghantui. Saat itu, ada ketakutan dari Inggris seperti dikatakan oleh Fintan O’Toole bahwa “*One is the fear of the Englishman turning into the “new European”, fitting himself into the structures of German domination.*”(O’Toole, 2018)”. Pernyataan ini tegas untuk mengatakan bahwa ada persoalan identitas yang melatari langkah Brexit tersebut, adanya ketakutan atas dominansi Jerman di Uni Eropa. Spanyol sebuah negara yang sukses sebagai kolonialis besar di masa lampau,

hari ini juga mengalami kesulitan domestik untuk menyelesaikan persoalan wilayah Catalunya yang ingin melepaskan diri (BBC News, 2019). Wilayah ini memiliki identitas berbeda dengan daerah Spanyol yang lain, bahkan bahasa yang mereka pakai yaitu bahasa catalan tidak sepenuhnya dipahami oleh orang Spanyol di luar Katalunya. Selain itu “*Catalonia is the wealthiest region in Spain and is industrially more advanced than the rest of the country.*”(Dewan, 2017)

Prancis mengalami persoalan terkait identitas yang tidak kalah pelik dibanding negara-negara tersebut di atas. Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah di luar teritori Eropa, budaya dan identitas Prancis cukup beragam. Keragaman itu tidak selamanya menjadi modal positif karena pada beberapa wilayah muncul kelompok-kelompok gerakan yang menuntut pelepasan wilayah seperti di Korsika (FLNC/ Front de libération nationale corse) dan Kaledonia Baru (FLNKS /Front de Libération Nationale Kanak Et Socialiste). Upaya politik dan sosial yang dilakukan pemerintah Prancis untuk mengatasi persoalan identitas dijabarkan cukup apik oleh Gay (Gay, 2019). Meskipun demikian, Kaledonia Baru dengan dipelopori oleh Kelompok Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis meminta Prancis menyelenggarakan referendum untuk merdeka (La Rédaction, 2020). Kita juga menyaksikan ada fenomena menguatnya Front National di negara itu yang menganut politik ekstrim kanan dan kebijakan anti imigran.

Kemunculan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat dengan wacana supremasinya mampu mengantarkannya menjadi presiden. Kemenangannya dianggap oleh sebagian orang sebagai ancaman bagi demokrasi di AS dan mengkhawatirkan tentang masa depan negara itu (Lieberman et al., 2019). Namun sebaliknya bagi kelompok mayoritas yang mampu memenangkannya menjadi presiden, ia adalah sosok yang diharapkan dapat memajukan negara. dengan slogan make Amerika great again Trump mampu menarik perhatian dunia dan masyarakat Amerika. Dia mendeklarasikan diri sebagai seorang nasionalis (Forgey, 2018) yang bekerja untuk negara dan rakyat. Dia yang membela kepentingan negara dan melawan orang-orang yang korup, globalis haus kekuasaan yang tidak peduli dengan negaranya. Bagi orang-orang dari kelompok masyarakat pendukungnya, Trump dianggap sebagai sosok yang dapat melindungi mereka dari ketakutan eksistensial mereka.

Di Indonesia kemunculan Jokowi dan Prabowo pada pemilu 2014 dan 2019 menyuguhkan tampilan identitas antitesis, antara rakyat biasa dan “orang besar”, orang sederhana dan orang kaya, orang lemah dan orang kuat. Eksploitasi antitetik (Riyandi, n.d.) (Media, n.d.) ini berlangsung terus menerus bahkan hingga periode pemilu berakhir. Dikotomi antara pendukung kedua politisi itu menimbulkan polarisasi dalam masyarakat yang hingga hari ini masih terjaga. Identitas pendukung politisi masih sering muncul di masyarakat sebagai cebong, kampret dan kadrun.

Imaji pemersatu

Sosok pemersatu, idola bangsa dan negara serta jargon-jargon nasional yang dapat dianggap sebagai imaji pemersatu banyak dimunculkan dan dilestarikan oleh banyak negara. Ia operasional dan berdaya guna untuk menggiring masyarakat negara tersebut untuk mempercayai, meyakini, dan mematuhi negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan sosial-ekonomi mereka.

Amerika Serikat berhasil membuat ikon pemersatu bangsa yang bahkan ingin mengambil semua bangsa di dunia ini sebagai bagian dari keluarganya dengan menampilkan diri sebagai Paman Sam, Uncle Sam. Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai gambaran atas kesadaran kehidupan di atas perbedaan budaya dan ras yang ada. Prancis memiliki semboyan Kebebasan (*liberté*), Persamaan (*égalité*) dan Persaudaraan (*fraternité*) sebagai bentuk kesadaran multikultural yang ada di negeri itu.

Meskipun demikian, Prancis juga membangun wacana kesadaran publik atas identitas primordial mereka dengan memperkuat imaji atas peradaban lama mereka. Mereka memiliki kebanggaan sebagai bangsa Ghalia yang hebat. Sebuah contoh kecil dapat dilihat dalam komik Asterik. Di situ dibangun imaji bahwa mereka adalah bangsa yang hebat sehingga kekuatan Julius Caesar dari Romawi yang hegemonik saat itu pun tidak bisa menyentuh tanah mereka. Amerika Serikat menampilkan diri sebagai Captain Amerika yang mampu mengorganisir para manusia super (*The Avengers*) untuk “menertibkan dunia”. Indonesia melakukan pembentukan imaji yang sama dengan kejayaan Majapahit yang mampu menyatukan nusantara di masa lampau. Kekuasaan kokoh dengan wilayah yang melampaui perbatasan negara saat ini mampu membangkitkan rasa bangga sebagai sebuah bangsa.

Namun demikian, imaji keunggulan personal kurang efektif dalam mengatasi persoalan hari ini ketika semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan mobilitas tanpa batas. Gelombang migrasi besar berlangsung terus menerus di banyak negara dan tidak bisa dibendung dengan melakukan pembatasan teritorial. Dalam realitas ini pembangunan tembok oleh Amerika Serikat di sepanjang perbatasan dengan Meksiko dinilai mengganggu kegiatan ekonomi (Torrijo, 2018) maupun wacana pengusiran para imigran yang disuarakan oleh kelompok ekstrim kanan Prancis menjadi proyek utopis semata.

Para imigran telah berusaha untuk menyesuaikan tradisi asal mereka dengan aturan yang berlaku di tempat mereka berada saat ini. Seperti contoh para imigran muslim yang berasal dari berbagai negara di Afrika di kota Paris. Mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah atas penggunaan tempat ibadah yang tidak boleh mengganggu kepentingan publik, karena beribadah adalah persoalan privat. Karena jumlah mereka yang banyak dengan fasilitas ibadah yang minim maka terjadi penumpukan jamaah pada saat-saat hari besar, seperti di hari Jumat. Dengan keterbatasan itu mereka melaksanakan sholat dengan sejumlah besar orang beribadah di depan imam.



Jamaah sholat jumat di Masjid daerah Porte de Clignancourt, Paris February 2017

Indonesia Sebagai Negara Multikultur

Proses pembentukan Indonesia sebagai sebuah wilayah politik telah terjadi selama ribuan tahun seiring dengan peristiwa pasang surutnya pusat-pusat peradaban. Pergantian kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti berikutnya diikuti oleh meluas dan menyempitnya wilayah politik mereka. Kesadaran atas keberbedaan di Indonesia telah ada sejak lama dan secara legal bisa dikatakan bahwa sumpah pemuda 1928 merupakan tonggak modern masyarakat Indonesia dalam memaknai nilai multikultural. Dengan deklarasi bersama itu masyarakat berusaha melakukan peleburan diri untuk memiliki identitas tunggal sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu upaya sebagaimana pernah disuarakan oleh Ernt Renan yang dalam konferensi tahun 1882 di Sorbonne mengatakan bahwa yang mendasar dari sebuah bangsa adalah ketika orang-orangnya memiliki banyak kesamaan dan melupakan perbedaan “... *que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses* ». (Renan, 1882)

Upaya peleburan diri dalam sebuah bangsa tidak bisa berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dan menyisakan persoalan identitas kultural dalam beberapa hal. Peleburan diri yang diperlukan untuk menjadi sebuah bangsa sulit terpenuhi karena ada perbedaan-perbedaan besar dari setiap unsur penyusunnya sehingga Indonesia mengalami pasang surut politik yang sedikit banyak terkait dengan persoalan identitas. Konflik di Sampit (Patji, 2003) merupakan salah satu persoalan identitas yang masih tersimpan dalam memori publik.

Pada dekade terakhir ini seperti yang menjadi kecenderungan dunia, persoalan identitas juga tidak luput dalam dunia politik. Wacana-wacana politik yang berkembang memperlihatkan Indonesia sedang menghadapi kecemasan yang sama dengan yang terjadi pada banyak negara di dunia. Wacana tentang bahaya desintegrasi dan perpecahan masyarakat mengalir deras di ruang publik sehingga klaim identitas sebagai seorang nasionalis dengan mengatakan « NKRI harga mati » dibayangkan sebagai penyeimbang

wacana desintegrasi yang ada saat ini. Kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap membahayakan keutuhan NKRI mendapatkan tentangan dari banyak pihak. Dalam persoalan ini, pembubaran organisasi seperti HTI menjadi contoh point krusial yang muncul di Indonesia (BBC News, 2018).

Sejak tahun 2014 pergolakan politik di tingkat elit dalam bentuk perebutan kekuasaan telah membawa persoalan identitas di tingkat masyarakat pendukungnya. Polarisasi kekuatan pendukung pemenang pemilu dengan pihak yang kalah masih terjaga hingga lebih dari 7 tahun kemudian. Nama sebutan cebong dan kampret sebagai penyebutan kedua kelompok pendukung kekuatan politik (Tazri, 2019) masih ditemui hingga hari ini di saat dunia sedang berkonsentrasi mengatasi pandemi Covid-19. Bahkan, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa (Ekonomi, n.d.; Nugrahaeni, n.d.) istilah Kadrun hingga hari ini masih ditemui diucapkan oleh tokoh publik. Ada konstruksi wacana yang dibangun antara saya dan orang lain (liyan), bahwa saya adalah yang paling berhak menentukan kebenaran atas nilai. Narasi-narasi perbedaan seperti ini tentunya perlu dihilangkan mengingat bahwa sejak lahir Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari berbagai macam identitas kultur berbeda.

PENUTUP

Masyarakat multikultur memiliki dinamika sosial tinggi yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kondusifitasnya. Pengalaman perang dunia yang menghancurkan tatanan peradaban benar-benar menjadi perhatian dunia dan teriring pula persoalan multikultur di dalamnya. Peristiwa politik dalam pemilihan kepemimpinan nasional suatu negara seringkali memperlihatkan adanya persoalan multikultur yang sebelumnya samar di negara tersebut. Indonesia yang telah mengikat diri dengan Bhineka Tunggal Ika juga memperlihatkan persoalan yang sama beberapa tahun terakhir ini. Berbeda itu sebuah keniscayaan hanya saja bagaimana mengelola perbedaan itu yang perlu dirumuskan dengan benar. Perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola negara dan dengan semua piranti yang ada, negara wajib menjaga dan menjalankan kebijakan itu untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News, 7 Mei 2018. (2018). HTI dinyatakan ormas terlarang, pengadilan tolak gugatan. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>
- Catalonia's bid for independence from Spain explained. (2019, October 18). *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-29478415>
- Colombo, E. (2014). Multiculturalisms. *Sociopedia*. <https://doi.org/10.1177/2056846014101>
- Dewan, A., Vasco Cotovio and Hilary Clarke. (2017). *Catalonia referendum: What just happened?* CNN. <https://www.cnn.com/2017/10/02/europe/catalonia-independence-referendum-explainer/index.html>
- Dhume, F. (2012). Multiculturalisme/multiculturel. *Dictionnaire de l'immigration en France*.

- Ekonomi, W. (n.d.). *Ngabalin: Hei Kadrun, Siap-siap Jenguk Junjunganmu Maha Guru Rocky Gerung Di Balik Jeruji Besi*. Warta Ekonomi. Retrieved September 15, 2021, from <https://www.wartaekonomi.co.id/read360251/ngabalin-hei-kadrun-siap-siap-jenguk-junjunganmu-maha-guru-rocky-gerung-di-balik-jeruji-besi>
- Forgey, Q. (2018). *Trump: "I'm a nationalist."* POLITICO. <https://politi.co/2AoDWIO>
- Gay, J.-C. (2019). L'autodétermination pour solder la colonisation: Le cas de la Nouvelle-Calédonie. *L'Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique*, 36, Article 36. <https://doi.org/10.4000/espacepolitique.5856>
- La Rédaction. (2020). *Nouvelle-Calédonie: Résultats du référendum du 4 octobre 2020 | Vie publique.fr*. <https://www.vie-publique.fr/en-bref/274808-nouvelle-caledonie-resultats-du-referendum-du-4-octobre-2020>
- Lambert, E. (2015, September 28). "La France, un pays de race blanche": Le général de Gaulle a-t-il vraiment tenu ces propos? Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/politique/ump/nadine-morano/la-france-un-pays-de-race-blanche-le-general-de-gaulle-a-t-il-vraiment-tenu-ces-propos_1103469.html
- Lieberman, R. C., Mettler, S., Pepinsky, T. B., Roberts, K. M., & Valelly, R. (2019). The Trump Presidency and American Democracy: A Historical and Comparative Analysis. *Perspectives on Politics*, 17(02), 470–479. <https://doi.org/10.1017/S1537592718003286>
- Media, K. C. (n.d.). *Jokowi: Meski Wajah "Ndeso", Otak Saya Internasional*. KOMPAS.Com. Retrieved September 12, 2016, from <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/28/1839275/Jokowi.Meski.wajah.Ndeso.Otak.Saya.Internasional>
- Nugrahaeni, C. K. (n.d.). *Ali Ngabalin Sebut Kadrun Siap-siap Jenguk Rocky Gerung di Penjara, Said Didu Sindir Wajah Pemerintah—Pikiran-Rakyat.com*. Retrieved September 15, 2021, from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012586444/ali-ngabalin-sebut-kadrun-siap-siap-jenguk-rocky-gerung-di-penjara-said-didu-sindir-wajah-pemerintah>
- O'Toole, F. (2018, November 16). *The paranoid fantasy behind Brexit | Fintan O'Toole*. The Guardian. <http://www.theguardian.com/politics/2018/nov/16/brexit-paranoid-fantasy-fintan-otoole>
- Patji, A. R. (2003). *TRAGEDI SAMPIT 2001 DAN IMBASNYA KE PALANGKA RAYA*. 5(2), 21.
- Renan, E. (1882). *Qu'est-ce qu'une nation? Conférence en Sorbonne*, 9.
- Riyandi, S. (n.d.). *Ahok sebut Prabowo keturunan Pangeran Diponegoro*. Merdeka.Com. Retrieved November 23, 2016, from <https://www.merdeka.com/politik/ahok-sebut-prabowo-keturunan-pangeran-diponegoro.html>
- R.L, R. L. (2016, July 6). *Marine Le Pen défend le Brexit, Trump, et appelle sa nièce à jouer «collectif»*. leparisien.fr. <https://www.leparisien.fr/politique/marine-le-pen-defend-le-brexit-trump-et-appelle-sa-niece-a-jouer-collectif-06-07-2016-5944605.php>
- Rosado, C. (2012). *What Makes a School Multicultural? Department of Urban Studies Eastern University of Philadelphia*.
- Tazri, M. (2019). *CEBONG DAN KAMPRET DALAM PESPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA*. 3(1), 7.
- Torrijo, H. R. (2018). *The Conservative Discourse Behind the US–Mexico Border Wall vs. Cooperation for Cross-Border Regional Development*. 24.
- Welle (www.dw.com), D. (n.d.). *Anti-immigrant attitudes rise worldwide: Poll | DW | 23.09.2020*. DW.COM. Retrieved October 6, 2021, from <https://www.dw.com/en/anti-immigrant-attitudes-rise-worldwide-poll/a-55024481>